

BAB II

DARI KIM DAE-JUNG SAMPAI ROH MOO-HYUN: PERJALANAN UNIFIKASI KOREA

Bab II ini akan membahas genealogi unifikasi di Semenanjung Korea. Sub-bab pertama dari bab ini akan membahas masa-masa Pra-Sunshine, yakni proposal unifikasi yang dibuat oleh Korea Utara dan Korea Selatan, serta persamaan dan perbedaannya. Sub-bab kedua kemudian melanjutkan pembahasan dengan masa-masa Sunshine Policy di bawah Presiden Kim Dae-jung, di mana diawali dengan investasi proyek Gunung Kumgang oleh grup *chaebol* Hyundai hingga terjadinya Deklarasi Bersama yang mengawali Pertemuan Inter-Korea I. Sub-bab ketiga akan membahas bagaimana kelanjutan kebijakan di bawah Presiden Roh Moo-hyun, pendirian Kawasan Industri Kaesong, serta Pertemuan Inter-Korea II.

2.1 Pra-Sunshine: Dasar-Dasar Unifikasi Semenanjung Korea

Memasuki Perang Dingin, Semenanjung Korea terbagi menjadi dua negara dengan ideologi berbeda: Korea Utara yang menganut ideologi komunis dan Korea Selatan yang menganut ideologi liberalism. Pemimpin dari dua negara tersebut sama-sama berkeinginan menyatukan Semenanjung Korea dalam ideologi yang dianut masing-masing. Ambisi itu menyebabkan pecahnya Perang Korea pada tahun 1950 hingga 1953. Keberhasilan Sekutu memukul mundur

Korea Utara dari Korea Selatan membuat kedua negara berada dalam posisi *stalemate* hingga saat ini.

Pasca Perang Korea, baik Korea Utara maupun Selatan sama-sama saling mengawasi dan beberapa kali membuat pemerintahan masing-masing turutan. Hal ini terlihat dari beberapa insiden yang melibatkan pemerintahan masing-masing, juga adanya baku tembak di area DMZ dalam kurun waktu 1966 sampai 1969. Insiden yang terbesar adalah upaya pembunuhan Presiden Park Chung-hee dari Korea Selatan sebanyak dua kali. Percobaan pertama terjadi pada 21 Januari 1968, di mana 31 orang dari Unit 124 komando pasukan khusus Korea Utara bergerak menuju Blue House sebelum akhirnya dihentikan oleh patroli polisi 800 m dari istana kepresidenan Korea Selatan tersebut. Untuk merespons percobaan pembunuhan tersebut, Presiden Park kemudian membentuk Unit 684 untuk membunuh Kim Il-sung, pemimpin Korea Utara saat itu. Namun, unit ini dibubarkan pada tahun 1971.

Percobaan kedua dilakukan oleh simpatisan Korea Utara di National Theater, Seoul, pada 15 Agustus 1974. Upaya tersebut menewaskan ibu negara Korea Selatan dan istri Presiden Park, Yuk Young-soo (Harlan, 2013). Pelaku pembunuhan tersebut yang juga simpatisan Korea Utara, Mun Se-gwang, digantung empat bulan kemudian di Seoul.

Meski terjadi berbagai ketegangan, Presiden Park mengupayakan negosiasi unifikasi di Semenanjung Korea tetap berjalan. Pada tanggal 4 Juli 1972, kedua Korea melakukan deklarasi bahwa upaya unifikasi mereka bersifat damai, independent, dan mengedepankan kepentingan masing-masing negara (H.-R. Lee

& Kim, 1972). Namun, karena stabilitas kedua negara yang terus terganggu, deklarasi ini tidak sempat diimplementasikan.

Upaya unifikasi kedua Korea berikutnya berjalan sesuai dengan proposal masing-masing. Baik proposal dari Korea Utara dan Selatan memiliki persamaan dan perbedaannya masing-masing. Kedua proposal ini masih relevan digunakan hingga sekarang dalam kebijakan unifikasi masing-masing negara, meski proposal unifikasi Korea Selatan mengalami perubahan setelah Sunshine Policy diterapkan.

2.1.1. Proposal Unifikasi Korea Utara: Republik Konfederasi Demokrasi Goryeo

Korea Utara memutuskan membuat proposal unifikasi dalam bentuk negara federasi pada tahun 1960. Dalam perkembangannya, proposal ini terus-menerus mengalami perubahan sampai akhirnya ditetapkan sebagai Republik Konfederasi Demokrasi Goryeo pada tanggal 10 Oktober 1980.

Dalam prinsipnya, ada tiga hal utama yang ditekankan lewat proposal ini. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: (1) Kedua Korea harus mengakui dan menghormati sistem dan ideologi masing-masing; (2) Kedua Korea harus membentuk organisasi yang disebut Majelis Tinggi Konfederasi Nasional; (3) Pemerintah konfederasi diijinkan untuk tetap melaksanakan ideologi dan sistem pemerintahan masing-masing, serta diperbolehkan membuat kebijakan sendiri (Young, 2001, h. 69–70).

Ada beberapa hal menarik yang dapat dilihat lewat prinsip-prinsip proposal ini. Dalam prinsip pertama, dapat kita lihat bahwa Korea Utara mengusulkan penggunaan satu negara, dua sistem (*one nation, two systems*) ketika Semenanjung Korea melakukan transisi sebelum unifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa Korea Utara menginginkan adanya kesetaraan ketika berhadapan dengan pemerintahan Korea Selatan. Selain itu, secara tidak langsung hal ini menunjukkan bahwa Korea Utara ingin mempertahankan rezim yang sudah lama berdiri, sehingga mereka tidak menyerahkan kedaulatan secara penuh. Keinginan ini tercermin kuat dalam prinsipnya yang ketiga, di mana pemerintahan konfederasi harus tetap diijinkan menggunakan sistem pemerintahan dan ideologi masing-masing yang sudah berjalan.

Untuk melihat lebih lanjut proposal yang diajukan oleh Korea Utara, kita dapat melihatnya dalam karakteristik Republik Konfederasi Demokrasi Goryeo. Karakteristik tersebut antara lain: (1) Bentuk pemerintahan ini bersifat transisi, sebelum akhirnya nanti menetap kepada satu negara satu sistem (*one nation, one system*); (2) Bentuk pemerintahan berupa konfederasi, di mana pemerintahan pusat tidak memiliki banyak kedaulatan; (3) Proposal ini didesain Korea Utara untuk mencegah upaya unifikasi melalui absorpsi oleh Korea Selatan (Young, 2001, h. 72–73).

Berdasarkan prinsip dan karakteristik yang telah dijabarkan, ada beberapa hal yang menjadi fokus utama Korea Utara dalam proposal unifikasi yang mereka ajukan. Pertama, Korea Utara ingin menjaga kestabilan rezim yang telah berdiri selama puluhan tahun. Penggunaan sistem konfederasi

memungkinkan mereka untuk tetap membiarkan ideologi Juche tetap berjalan dan rezim dinasti Kim tetap stabil berkuasa di Korea Utara. sebab, pemerintahan pusat nantinya hanya berfungsi sebagai simbol dari unifikasi itu sendiri tanpa banyak kedaulatan.

Kedua, Korea Utara masih membangun “tembok” terhadap Korea Selatan dalam pelaksanaan unifikasi. Pemisahan pemerintahan lewat sistem konfederasi tidak hanya memungkinkan rezim Korea Utara tetap bertahan, tetapi juga mencegah Korea Selatan meleburkan pemerintahan menjadi satu. Hal ini ditunjukkan lewat adanya Majelis Tinggi Konfederasi Nasional yang diusulkan Korea Utara. Keberadaan badan ini ke depannya adalah sebagai badan yang membimbing kedua Korea untuk melaksanakan pemerintahan masing-masing di bawah konfederasi, mencegah adanya konflik, dan membangun kolaborasi kedua negara dalam segala bidang (Kwak, 1991, h. 52). Fungsi-fungsi badan ini menunjukkan adanya upaya untuk menciptakan penengah antara kedua Korea agar konflik-konflik bersifat politis dan ideologis dapat dihindari.

Selain itu, yang perlu diperhatikan dalam proposal Korea Utara ini adalah sifat politik luar negeri ke depan di Semenanjung Korea. Proposal Korea Utara mengharuskan politik luar negeri nantinya bersifat netral, tanpa mengikuti pakta militer maupun blok tertentu (Kwak, 1991, h. 53). Hal ini menunjukkan bahwa proposal tersebut tidak akan terlaksana selama adanya campur tangan kekuatan asing di Semenanjung Korea, secara spesifik tertuju kepada keberadaan Amerika Serikat sebagai sekutu Korea Selatan. Jika

proposals ini terwujud, politik luar negeri nantinya akan diurus oleh Majelis Tinggi Konfederasi Nasional, di mana badan ini akan mengkoordinasikan pelaksanaannya bagi dua pemerintahan Korea.

2.1.2. Proposal Unifikasi Korea Selatan: National Commonwealth Unification

Memasuki iklim politik yang lebih stabil pada tahun 1988, Korea Selatan di bawah Presiden Roh Tae-woo memulai kebijakan Nordpolitik. Oleh para ahli, kebijakan ini dinilai sebagai kebijakan Presiden Roh yang paling berpengaruh. Kebijakan ini memiliki enam program utama yang diterapkan, yaitu: (1) Transisi menuju demokrasi bersama dengan negara-negara sekutu Korea Selatan, terutama Amerika Serikat; (2) Pembentukan hubungan dengan negara-negara sosialis selama masa demokratisasi, terutama negara-negara yang berdiri pasca runtuhnya Tirai Besi; (3) Peningkatan dialog antara Korea Selatan dan Korea Utara; (4) Peningkatan hubungan perdagangan dengan Tiongkok; (5) Peningkatan legitimasi dari Republik Keenam, sehingga politik luar negeri rezim terdahulu sudah tidak berlaku; (6) Memperbolehkan warga Korea Selatan untuk berpergian ke negara-negara Eropa Timur dan Uni Soviet agar rakyat dapat melihat langsung kegagalan komunisme (Strnad, 2010, h. 218–219).

Berdasarkan enam program yang diluncurkan dalam kebijakan Nordpolitik, Presiden Roh kemudian memberikan pidatonya yang dinamakan

Deklarasi 7 Juli. Deklarasi yang dibacakan pada 7 Juli 1988 ini memiliki arti penting, karena pidato ini adalah puncak penting dari segala upaya damai unifikasi Korea Selatan sejauh ini. Upaya-upaya damai itu antara lain penghapusan pendidikan anti-komunis dan menggantinya dengan pendidikan yang mempromosikan upaya unifikasi, penolakan citra Korea Utara sebagai musuh kepada publik, membuat segala informasi tentang Korea Utara lebih mudah diakses oleh publik, dan mempromosikan normalisasi hubungan dengan Korea Utara. Inti dari Deklarasi 7 Juli ini yaitu: (1) Kerja sama yang aktif antara Korea Utara dan Selatan; (2) Pertukaran surat dan kunjungan keluarga yang terpisah selama Perang Korea; (3) Perluasan hubungan dagang Korea Utara dan Selatan; (4) Peningkatan pertukaran barang non-militer yang seimbang dengan berbagai negara; (5) Kerja sama dengan berbagai negara demi kebaikan Korea Selatan; (6) Membantu Korea Utara meningkatkan hubungannya dengan negara-negara kapitalis dan Korea Selatan meningkatkan hubungan dengan negara-negara sosialis (Strnad, 2010, h. 220).

Implementasi Deklarasi 7 Juli dapat dilihat lebih lanjut dalam proposal unifikasi Korea Selatan yang diresmikan Presiden Roh pada September 1989. Rumusan proposal ini dinamakan National Commonwealth Unification (NCU). NCU memiliki tiga prinsip utama untuk mencapai unifikasi, yaitu independen, damai, dan demokrasi. Independen memiliki arti bahwa unifikasi dilakukan oleh dua Korea tanpa intervensi dari negara asing (Young, 2001, p. 61). Korea Selatan memandang bahwa kedua Korea harus mendiskusikan sendiri usaha-usaha untuk mencapai unifikasi di tingkat

nasional dengan semangat menentukan nasib sendiri (*self-determination*). Damai berarti unifikasi harus dilaksanakan tanpa menimbulkan konflik (Young, 2001, p. 61). Unifikasi sendiri bukan merupakan akhir dari tujuan yang diinginkan Korea Selatan, tetapi masa depan yang lebih baik bagi dua Korea, sehingga usaha-usaha tersebut harus dilakukan dengan cara-cara damai. Sementara demokrasi berarti unifikasi harus menjamin hak dan kebebasan setiap warga Korea (Young, 2001, h. 62). Proses-proses yang dilakukan harus menjamin hak-hak dasar demokrasi dan menjamin setiap kebebasan warga Korea pasca unifikasi.

Dalam pelaksanaannya, NCU berjalan berdasarkan tiga tahap, yakni rekonsiliasi dan kooperasi, pembentukan Korean Commonwealth, dan unifikasi. Tahap rekonsiliasi dan kooperasi merupakan tahap awal, di mana Korea Utara dan Korea Selatan membangun hubungan baik berdasarkan *mutual trust* (Young, 2001, h. 62). Tahap ini berfungsi untuk menghilangkan segala prasangka dan permusuhan di antara dua Korea. Dalam tahap ini, kedua Korea harus mempromosikan berbagai hubungan dan pertukaran inter-Korea untuk memahami dan menghormati sistem yang sudah berjalan, sehingga mereka dapat mencoba mengatur pembagian urusan di tingkat nasional.

Tahap Korean Commonwealth (KC) adalah bentuk pemerintahan transisi sebelum menuju unifikasi yang sesungguhnya. Tahap ini penting karena akan melandasi bagaimana kesepakatan pemerintahan gabungan Korea yang terbentuk di tahap akhir. Dalam tahap ini, kedua Korea mulai melakukan langkah-langkah unifikasi politik dalam bentuk Konferensi Utara-Selatan,

Konferensi Tingkat Menteri, Dewan Legislatif, dan Sekretariat Bersama. Langkah yang diambil KC merupakan langkah realistis, karena pemisahan dua Korea yang cukup lama menimbulkan berbagai ketidakpercayaan dan prasangka, sehingga perlu dilakukan penyatuan-penyatuan politik dalam bentuk konfederasi secara *de-facto* (Young, 2001, h. 64).

Tahap terakhir adalah unifikasi. Untuk mencapai tahap ini, waktu yang diperlukan bergantung dari bagaimana hubungan inter-Korea, ideologi kedua Korea yang berkembang, dan lamanya waktu untuk membentuk sistem politik yang homogen selama tahap KC (Young, 2001, h. 65). Oleh karena itu, dapat dibutuhkan waktu yang lama untuk mencapai tahap ini. Dalam tahap ini, kedua Korea membentuk pemerintahan bersama dalam satu negara satu sistem (*one nation, one system*) dan melengkapi organisasi-organisasi pemerintahan yang diperlukan.

Hal menarik yang perlu diperhatikan adalah KC sebagai bentuk pemerintahan transisi menuju unifikasi. Bentuk KC sendiri sedikit mirip dengan bentuk final Republik Goryeo, di mana kedua negara akan diatur oleh satu pemerintahan pusat. Hanya saja, ada satu perbedaan antara KC dan Republik Goryeo, yakni negara anggota KC masih dapat menjalankan politik luar negerinya sebagai entitas yang terpisah. Kedua Korea masih dilihat sebagai dua negara berdaulat secara hukum internasional dalam menjalankan hubungan luar negeri masing-masing (Young, 2001, h. 67).

2.2. Kim Dae-jung: Awal Kisah Sinar Matahari (1998-2003)

Memasuki tahun 1998, rakyat Korea Selatan memilih Kim Dae-jung sebagai presiden baru mereka. Presiden Kim mengambil alih tampuk kekuasaan dengan dua situasi global yang sedang menjadi perhatian. Pertama, suasana politik internasional pasca berakhirnya Perang Dingin. Seiring kekalahan Uni Soviet dalam Perang Dingin, negara-negara sekutunya mulai merombak kebijakan luar negerinya, tak terkecuali Korea Utara. Sebagai usahanya menyesuaikan diri dengan kondisi internasional, Korea Utara memulai banyak dialog dengan Korea Selatan sejak sebelum Presiden Kim berkuasa, tepatnya saat Presiden Roh memulai lewat kebijakan Nordpolitik. Selain itu, Korea Utara juga menjadi anggota PBB bersama-sama dengan Korea Selatan dan meratifikasi keanggotaan International Atomic Energy Agency (IAEA), sehingga lembaga tersebut dapat melakukan inspeksi terhadap penggunaan nuklir di sana (Choi, 1991, h. 28).

Kedua, terjadi krisis finansial di Asia pada tahun 1997, di mana Korea Selatan merupakan salah satu negara yang paling terdampak. Hal ini menyebabkan Korea Selatan harus meminta bantuan kepada IMF untuk menghindari skenario terburuk yang dapat melumpuhkan ekonomi. Untuk merespons situasi tersebut, Presiden Kim kemudian meluncurkan kebijakannya yang terkenal, yaitu kampanye pengumpulan emas. Bekerja sama dengan stasiun KBS, kampanye ini mengajak rakyat di seluruh Korea Selatan bergotong royong menyumbangkan emas untuk membayar hutang negara kepada IMF. Kampanye ini didukung dua grup *chaebol* besar di Korea Selatan, yakni Samsung dan Daewoo, yang sudah memulai kampanye ini sejak akhir tahun 1997 bersama

karyawan mereka (S.-K. Kim & Finch, 2002, h. 125). Slogan-slogan kampanye yang menarik seperti “Orang Korea adalah Pecinta Emas”, “Cintai Negara”, dan “Setiap Orang Korea Tidak Mampu Berdiri Jika Ekonomi Nasional Tidak Kuat”, serta adanya dukungan dari berbagai pemuka agama, membuat kampanye ini menarik perhatian besar publik. Kampanye ini sukses besar karena berhasil mengumpulkan US\$ 1,8 miliar, sehingga hutang negara dapat dibayar kepada IMF tiga tahun lebih awal dari waktu jatuh tempo. Ekonomi Korea Selatan juga pulih lebih cepat jika dibandingkan dengan negara Asia lainnya.

Dalam situasi seperti inilah Presiden Kim meluncurkan Sunshine Policy, kebijakan luar negerinya dalam menghadapi Korea Utara. Kebijakan ini secara resmi diumumkan pada Februari 1998. Terminologi Sunshine Policy ini digunakan oleh Presiden Kim tidak lama setelah Amerika Serikat menandatangani *Agreed Framework* dengan Korea Utara (Straub, 2018, h. 17). Sunshine Policy terinspirasi dari fabel Aesop terkenal berjudul *The North Wind and The Sun*, dengan pesan moral kebaikan terus-menerus akan membuat seseorang yang dingin menjadi lebih terbuka. Pesan moral inilah yang menjadi semangat kebijakan tersebut.

Secara umum, Sunshine Policy memiliki tiga poin utama, yaitu: (1) Tidak diperbolehkan melakukan provokasi militer; (2) Tidak diperbolehkan melakukan unifikasi secara absorpsi; (3) Korea Selatan akan berkomitmen melakukan kerja sama dan rekonsiliasi yang menguntungkan dua belah pihak. Secara sekilas, semangat Sunshine Policy sejalan dengan kebijakan Nordpolitik milik Presiden

Roh Tae-woo, di mana dialog dan diplomasi menjadi hal paling utama untuk melakukan unifikasi dengan Korea Utara.

Ada dua *highlight* utama dalam pelaksanaan Sunshine Policy oleh Presiden Kim. Pertama, tidak diperbolehkan melakukan provokasi militer. Unifikasi hendaknya dilakukan dengan upaya-upaya damai. Kedua, tidak boleh melakukan unifikasi dengan cara absorpsi. Cara ini dikhawatirkan akan menimbulkan lebih banyak konflik di masa depan. Ketiga, Korea Selatan akan berkomitmen melakukan kerja sama dan rekonsiliasi yang menguntungkan dua belah pihak. Jalan-jalan diplomasi akan ditempuh Korea Selatan untuk mencapai unifikasi di Semananjung Korea.

Selama pelaksanaannya, terdapat dua peristiwa bersejarah yang menyebabkan Sunshine Policy menjadi salah satu kebijakan unifikasi yang memiliki pengaruh. Peristiwa tersebut adalah proyek Tamasya ke Gunung Kumgang yang merupakan investasi Hyundai Group di Korea Utara dan Pertemuan Inter-Korea, di mana pemimpin kedua Korea bertemu pertama kali dalam 50 tahun sejak Perang Korea.

2.2.1. Tamasya ke Gunung Kumgang: Perjalanan Darat Bersejarah

Chung Ju-yung ke Korea Utara

Salah satu strategi yang digunakan Presiden Kim dalam mendekati Korea Utara adalah lewat pendekatan ekonomi. Hal ini sejalan dengan poin ketiga Sunshine Policy, di mana Korea Selatan berusaha melakukan kerja

sama dan rekonsiliasi dengan Korea Utara. Seiring dengan berakhirnya Perang Dingin, pendekatan ekonomi dalam perspektif keamanan dilakukan untuk menciptakan adanya interdependensi antara satu negara dengan negara lainnya, sehingga perang dan konflik dapat dihindari. Adanya interdependensi ekonomi juga akan memicu bentuk kerja sama lainnya bagi dua Korea.

Presiden Kim menggunakan pendekatan ekonomi dalam bentuk *business-track diplomacy* untuk mendekati Korea Utara. *Business-track diplomacy* adalah satu di antara sembilan bentuk *multi-track diplomacy*, di mana para pelaku bisnis seperti MNC merupakan pemain penting dalam pelaksanaannya (J.-Y. Kim, 2004, h. 74). Dalam pelaksanaan *business-track diplomacy* ini, Hyundai Group merupakan pemain utama untuk mendorong kerja sama dengan pemerintah Korea Utara, sementara Presiden Kim berperan menciptakan iklim politik yang baik untuk mendukung investasi di sana.

Proyek Tamasya ke Gunung Kumgang mustahil terwujud tanpa peranan Chung Ju-yung, pendiri Hyundai Group sekaligus pendukung pemerintahan Presiden Kim. Selain pengembangan bisnis Hyundai Group ke Korea Utara, Chung memiliki alasan pribadi untuk melaksanakan proyek ini. Chung lahir di Tongchon, sebuah kota di Provinsi Kangwon, Korea Utara, yang terletak di dekat Gunung Kumgang. Dalam memoarnya, Chung berkata bahwa proyek ini merupakan proyek yang penting bagi perdamaian negaranya dan juga takdir akhirnya (J. Y. Chung, 1998, h. 98). Hal ini

menunjukkan dedikasi Chung untuk mewujudkan pengembangan Gunung Kumgang di tahun-tahun akhir hidupnya.

Sebenarnya, Chung telah menandatangani kontrak pelaksanaan proyek dengan pemimpin Korea Utara, Kim Il-sung, pada Januari 1989 di Pyongyang. Kim Il-sung telah lama menaruh perhatian terhadap Gunung Kumgang sebagai atraksi wisata untuk menarik turis mancanegara sejak tahun 1981, ketika dia sedang melaksanakan inspeksi di sana (Son, 2004, h. 226). Pemerintah Korea Utara telah berusaha membuat proyek pariwisata tersebut, tetapi gagal. Oleh karena itu, Kim menaruh perhatiannya terhadap Hyundai Group yang juga ingin mengembangkan proyek yang sama. Sayangnya, area tersebut masih dibuka secara terbatas kepada Korea Selatan, sehingga proyek pariwisata tersebut tidak mengalami banyak perkembangan.

Ketika Presiden Kim lewat Sunshine Policy memberikan dukungan terhadap proyek Gunung Kumgang, Chung bergegas merealisasikan proyek tersebut ke tahap selanjutnya. Dia kemudian mengarahkan anak-anaknya untuk membuka jaringan ke Korea Utara agar proyek tersebut dapat dinegosiasi ulang dan memberikan sepuluh persen saham pribadinya untuk melakukan investasi kepada Pyongyang (J.-Y. Kim, 2004, h. 78). Setelah berbagai pembicaraan awal antara pejabat Hyundai Group dan Korea Utara, Chung melakukan perjalanan darat bersejarah ke Pyongyang.

Chung yang saat itu telah berusia 83 tahun melakukan perjalanan dengan limosin hitamnya, diikuti 50 truk yang membawa 500 sapi sebagai bentuk persembahan secara simbolis kepada rakyat Korea Utara. Persembahan tersebut dipilih oleh Chung karena ingatan masa lalunya saat menjual sapi milik ayahnya seharga 70 won dan kabur dari kampung halamannya di Tongchon, kemudian mendirikan Hyundai Group dari hasil menjual hewan tersebut (KBS World, 2018; Strom, 1998). Perjalanan ini dimulai dari rumah Chung di Jongno-gu, Seoul, kemudian memasuki Desa Imjingak, di mana rombongan besar tersebut disambut sorak-sorai oleh warga setempat. Begitu rombongan besar melewati Panmunjom pada pukul 10 pagi waktu setempat, Chung resmi menjadi orang sipil pertama yang memasuki Korea Utara sejak Perang Dunia II berakhir, tanpa pengawasan dari pemerintah asalnya.

Chung menetap di Korea Utara selama delapan hari. Selama di sana, dia mengunjungi kampung halamannya di Tongchon dan meninjau Proyek Pariwisata Gunung Kumgang. Dia juga ditemani oleh keluarganya, yakni tiga saudara kandung dan dua putranya, yang datang ke Korea Utara via Beijing.

Perjalanan bersejarah ini berhasil melahirkan Kawasan Pariwisata Gunung Kumgang yang resmi berjalan sejak tahun 2002. Tercatat sampai pada Juli 2008, lebih dari satu juta penduduk Korea Selatan telah mengunjungi situs pariwisata tersebut. Peresmian objek pariwisata ini

disambut dengan antusias oleh penduduk Korea Selatan karena Gunung Kumgang memiliki nilai budaya penting di Semenanjung Korea.

2.2.2. Menuju Babak Baru: Pertemuan Inter-Korea Pertama dan Deklarasi 15 Juni 2000

Suksesnya *multi-track diplomacy* lewat perjalanan sapi Chung Ju-yung membawa kesuksesan pertama Sunshine Policy bagi Kim Dae-jung. Setelah perjalanan bersejarah itu, Kim akhirnya memulai pekerjaan selanjutnya, yakni mempersiapkan Pertemuan Inter-Korea. Pertemuan ini merupakan babak sejarah baru bagi perdamaian di Semenanjung Korea karena untuk pertama kalinya pasca Perang Korea, kedua pemimpin Korea bertemu untuk membicarakan unifikasi.

Sebelum pertemuan ini terjadi, terlebih dahulu Kim Dae-jung memberikan pesan mengenai kebijakannya kepada Korea Utara dan dunia internasional lewat pidato. Pidato tersebut disampaikan di Free University, Berlin, Jerman, pada 9 Maret 2000. Pemilihan tempat ini disengaja untuk memperkuat pesan bahwa Semenanjung Korea masih terbelah sebagai imbas dari Perang Dingin dan bergerak menuju unifikasi seperti apa yang terjadi di Jerman. Pemilihan Free University ini juga dimaksudkan sebagai pesan bahwa Korea Selatan memberikan gestur pemahaman kepada Korea Utara, karena universitas ini dahulu terletak di Berlin Timur yang dikontrol oleh Uni Soviet, sekutu Korea Utara.

Dalam pidato ini, ada dua pesan yang disampaikan Kim Dae-jung terkait Sunshine Policy. Pertama, dia percaya bahwa ekonomi merupakan kunci dari unifikasi itu sendiri. Dia mencoba membandingkan bagaimana Korea Selatan yang awalnya miskin dapat bangkit menjadi kekuatan ekonomi lewat the Miracle in Han River, sama seperti Jerman Barat dengan the Miracle in the Rhyne. Kedua, dia secara langsung mengatakan bahwa Korea Selatan, seperti Jerman Barat, menjadi pemeran penting dalam pelaksanaan reunifikasi karena Korea Selatan secara ekonomi lebih baik daripada Korea Utara (D. Kim, 2000).

Pertemuan ini terjadi pada 13-15 Juni 2000 di Korea Utara. Presiden Kim Dae-jung ditemui langsung oleh pemimpin Korea Utara, Kim Jong-il. Dalam pertemuan yang berlangsung tiga hari tersebut, disepakati sebuah persetujuan yang dikenal dengan Deklarasi Gabungan 15 Juni 2000. Sejumlah poin yang disepakati dalam deklarasi tersebut adalah penyelesaian permasalahan di Semenanjung Korea oleh rakyat Korea Utara dan Selatan, pertemuan keluarga terpisah pada 15 Agustus³, dan pelaksanaan dialog antara kedua Korea untuk mencapai perdamaian.

Sebagai bentuk implementasi dari deklarasi tersebut, pertemuan keluarga terpisah pertama kemudian diadakan pada 15 Agustus 2000 (Hincks, 2018). Pertemuan ini tentunya menjadi reuni yang mengharukan karena agenda ini pertama kali dilakukan setelah Perang Korea meletus lima puluh tahun lalu.

³ Korea Utara dan Selatan sama-sama merayakan kemerdekaan dari Jepang pada 15 Agustus

Keberhasilan Kim Dae-jung dalam melaksanakan Pertemuan Inter-Korea Pertama dan reuni keluarga membuatnya dianugerahi Nobel Perdamaian pada tahun 2000. Kim Dae-jung sebagai politisi dianggap berjasa dalam meletakkan pondasi perdamaian di Semenanjung Korea.

2.3. Roh Moo-hyun: Peresmian Kawasan Industri Kaesong dan Pertemuan Inter-Korea Kedua

Setelah masa jabatan Kim Dae-jung berakhir, Roh Moo-hyun kemudian terpilih sebagai presiden Korea Selatan. Pada tahun ketika dirinya terpilih, skandal yang mencoreng nama Sunshine Policy baru saja terungkap pada Februari 2003. Skandal ini terkenal dengan nama Cash-for-Summit, di mana terungkap bahwa pemerintahan Kim Dae-jung secara diam-diam membayar uang sejumlah US\$ 500 juta agar Korea Utara mengikuti Pertemuan Inter-Korea (Lankov, 2013, h. 164). Selain itu, Korea Utara masih tetap tidak menunjukkan tanda-tanda komitmen untuk melakukan denuklirisasi di Semenanjung Korea. Bahkan, Korea Utara keluar dari IAEA pada 11 Januari 2003 dan mulai melakukan produksi nuklir (Arms Control Association, 2019).

Sebenarnya, dua peristiwa ini sudah cukup untuk membuat pendekatan ala Sunshine Policy dihentikan. Namun, Roh memutuskan untuk tetap melanjutkan Sunshine Policy di masa pemerintahannya, bahkan berada di prioritas teratasnya. Roh memiliki cara pandang yang sama dengan Kim Dae-jung, yakni ekonomi merupakan kunci penting agar unifikasi terlaksana di Semenanjung Korea. Oleh

karena itu, dia mendorong pembangunan ekonomi di Korea Selatan, bahkan menargetkan negaranya dapat berubah menjadi pusat ekonomi dan finansial di kawasannya (H. N. Kim, 2006, h. 38).

Bukti dari keseriusan pendekatan ekonomi ini adalah pembangunan Kawasan Industri Kaesong. Kawasan ini sudah mulai dibangun pada Juni 2003 dan dibuka pada Desember 2004. Kawasan industri ini memberikan kesempatan kepada industri Korea Selatan untuk membuka pabrik dan berinvestasi, sementara Korea Utara dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi penduduknya (BBC News, 2016). Hyundai Asan, divisi dari perusahaan Hyundai, ditunjuk oleh Korea Utara untuk mengembangkan lahan di sana (B. J. Lee, 2005). Seiring dengan meningkatnya jumlah industri Korea Selatan yang membuka pabrik dan berinvestasi di sana, Kaesong kelak menjadi salah satu sumber pendapatan yang penting bagi Korea Utara.

Setelah sukses membuka Kawasan Industri Kaesong, Roh kemudian menyiapkan Pertemuan Inter-Korea yang kedua. Pertemuan ini dilaksanakan pada 2-4 Oktober 2004 di Pyongyang, Korea Utara. Sebenarnya, dalam Pertemuan Inter-Korea tahun 2000 lalu, Kim Dae-jung dan Kim Jong-il telah menyepakati bahwa pertemuan selanjutnya akan digelar di Korea Selatan. Namun, hal ini tidak terjadi pada tahun 2007. Diduga hal ini disebabkan oleh keinginan Korea Utara untuk menghadiri Pertemuan Inter-Korea tahun 2007 ada karena rezim Kim Jong-il ditekan secara politik dan ekonomi setelah berhasil mengembangkan nuklir. Agar rezim tetap berdiri, Korea Utara harus menghentikan pengembangan nuklirnya dan sebagai gantinya akan mendapatkan bantuan ekonomi.

Dalam pertemuan ini, Kim Jong-il menghadiahi Roh Moo-hyun jamur *songyi* senilai US\$ 2,6 juta. Jamur ini harganya mahal di Korea Selatan, sehingga hadiah ini dinilai berharga bagi Roh. Sebagai balasan, Roh memberikan berbagai koleksi film Korea Selatan dan Barat dan seperangkat peralatan minum teh.